

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN BPJN LAMPUNG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Muhammad Asyri¹, Relit Nur Edi², Muhammad Irfan³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

muhammadasriiii1234@gmail.com¹, relit@radenintan.ac.id²,

muhammadirfan@radenintan.ac.id³

Abstract

This study aims to analyze the implementation of road space utilization policies at the Lampung National Road Implementation Agency (BPJN) based on Lampung Governor Regulation Number 1 of 2023 from a fiqh siyasah perspective. The study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that policy implementation has been carried out through licensing mechanisms, inspections of administrative and technical requirements, supervision of work implementation, and evaluation of road condition restoration. However, the implementation has not been running optimally because there are still obstacles in the form of ineffective inter-agency coordination, delays in post-excavation road condition restoration, and non-uniform compliance of utility providers with technical provisions. From a fiqh siyasah perspective, the implementation of the policy is a form of siyasah tanfidziyyah which emphasizes the principles of al-'adl (justice), al-amanah (trust), and al-maslahah (benefit) in governance. Therefore, strengthened coordination, increased oversight, and increased compliance with technical provisions are needed to ensure the implementation of road space utilization policies is more effective, accountable, and provides benefits to the public.

Keywords: Policy Implementation, Road Space, Lampung BPJN, Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfidziyyah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui mekanisme perizinan, pemeriksaan persyaratan administratif dan teknis, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, serta evaluasi pemulihan kondisi jalan. Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala berupa koordinasi antarinstansi yang belum efektif, keterlambatan pemulihan kondisi

jalan pascapenggalan, dan belum seragamnya kepatuhan penyelenggara utilitas terhadap ketentuan teknis. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, implementasi kebijakan tersebut merupakan bentuk *siyasah tanfidziyyah* yang menekankan prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-amanah* (amanah), dan *al-maslahah* (kemaslahatan) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan pengawasan, serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan teknis agar implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ruang Milik Jalan, BPJN Lampung, Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfidziyyah.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas pelayanan publik. Selain berfungsi sebagai prasarana transportasi, jalan juga menjadi ruang bagi pembangunan berbagai utilitas seperti jaringan listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, gas, dan serat optik.¹ Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) harus dilakukan secara tertib agar tidak mengganggu fungsi jalan, keselamatan pengguna jalan, maupun merusak aset negara. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Dalam Penggalan Dan Penataan Infrastruktur Publik sebagai pedoman pemanfaatan ruang milik jalan di Provinsi Lampung. Regulasi tersebut bertujuan mewujudkan kepastian hukum, menjaga fungsi jalan, serta menjamin pemulihan kondisi jalan setelah pelaksanaan pekerjaan utilitas.²

Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dengan mobilitas barang, jasa, dan manusia yang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan pemanfaatan ruang milik jalan terus meningkat seiring berkembangnya pembangunan infrastruktur utilitas. Berdasarkan data Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, panjang jalan nasional yang dikelola mencapai sekitar 1.298,48 km dengan tingkat kemantapan jalan di atas 90% pada tahun 2024.³ Meskipun demikian, tingginya aktivitas pembangunan utilitas masih berpotensi menimbulkan kerusakan badan jalan, mengganggu

¹ Dhian Sawitri, 'The Contribution of Road Construction on Regional Economic Development in Indonesia', VII.3 (2023), pp. 313–33.

² Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Dalam Penggalan Dan Penataan Infrastruktur Publik

³ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung, *BPJN Lampung Gelar Press Conference Nataru 2024/2025*, 24 Desember 2024, diakses melalui situs resmi BPJN Lampung.

kelancaran lalu lintas, serta menimbulkan risiko keselamatan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.

Sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung mempunyai tanggung jawab dalam pembangunan, preservasi, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan nasional. BPJN Lampung juga berwenang memberikan rekomendasi teknis, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan utilitas, serta memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang milik jalan memenuhi persyaratan administratif maupun teknis. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya koordinasi antarinstansi, keterlambatan pemulihan kondisi jalan setelah pekerjaan utilitas, serta belum seragamnya kepatuhan pelaksana terhadap ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan masih memerlukan evaluasi agar penyelenggaraan infrastruktur dapat berlangsung secara tertib, aman, dan berkelanjutan.⁴

Dalam perspektif Islam, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara adil demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisā' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ

بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. An-Nisā' [4]: 58).

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah secara profesional serta menegakkan keadilan dalam

⁴ Dyah Kusuma; Soemitro Dewi Ria Asih Aryani; Suprayitno, Hitapriya; Budianto, Herry, 'Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional, Studi Kasus Di Ruas Jalan MERR Surabaya', *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, Vol 4, No 3 (2020): Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas, 2020 <<https://iptek.its.ac.id/index.php/jmaif/article/view/7103/4788>>.

setiap kebijakan yang diambil. Dalam konteks pemanfaatan ruang milik jalan, prinsip tersebut menghendaki agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan mampu memberikan kemaslahatan, melindungi kepentingan umum, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan utama dalam konsep *siyasah tanfidziyyah*, yang menempatkan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.⁵

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pelaksanaan kebijakan pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab *ulil amri* dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Konsep *siyasah tanfidziyyah* menempatkan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yang berkewajiban menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-amanah* (amanah), *al-maslahah* (kemaslahatan), serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan tidak hanya dipandang sebagai pelaksanaan ketentuan hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepentingan umum, melindungi fasilitas publik, serta mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai *fiqh siyasah*.⁶

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pemanfaatan ruang milik jalan dari berbagai perspektif. Dyah Kusuma Dewi dkk. (2020) membahas pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional,⁷ Dinda Maurizka Azura dan Iwan Erar Joesoef (2022) mengkaji pemanfaatan ruang milik jalan tol oleh UMKM,⁸ sedangkan Heru Sugiyono dan Dwi Aryanti Ramadhani (2023) menganalisis pemanfaatan jalan tol sebagai aset negara untuk kepentingan publik.⁹ Selain itu, Fadhil Azhar Rahmat (2024) meneliti kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan, sementara Yusuf Maulana (2021) mengkaji kebijakan penataan jalan

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisā' [4]: 58.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 249–281.

⁷ Dewi Ria Asih Aryani; Suprayitno, Hitapriya; Budianto, Herry, 'Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional, Studi Kasus Di Ruas Jalan MERR Surabaya'.

⁸ Oleh Usaha Mikro and Kecil D A N Menengah, 'Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol Oleh Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah', 27 (2022), pp. 61–71.

⁹ Dwi Aryanti Ramadhani Heru Sugiyono, 'UTILIZATION OF TOLL ROAD SECTIONS AS STATE PROPERTY FOR MAXIMIZING PUBLIC WELFARE', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 25, N (2023), pp. 300-315.

melalui perspektif *fiqh siyasah*. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemanfaatan ruang milik jalan pada BPJN Lampung dengan perspektif *fiqh siyasah*, khususnya *siyasah tanfidziyyah*.

Hasil telaah pustaka menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*). Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek hukum administrasi negara, pengelolaan aset, maupun teknik sipil dalam pemanfaatan ruang milik jalan. Sementara itu, penelitian *fiqh siyasah* umumnya membahas persoalan ketatanegaraan, kepemimpinan, dan pemerintahan Islam tanpa mengaitkannya dengan implementasi kebijakan di bidang infrastruktur publik. Dengan demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan pada BPJN Lampung menggunakan perspektif *fiqh siyasah*, khususnya konsep *siyasah tanfidziyyah* sebagai dasar analisis.¹⁰

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan melalui perspektif *fiqh siyasah*, khususnya konsep *siyasah tanfidziyyah*, sehingga implementasi kebijakan tidak hanya dinilai dari aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amanah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), serta tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pendekatan tersebut diharapkan memberikan perspektif baru dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara Islam yang mengintegrasikan hukum positif dengan nilai-nilai *fiqh siyasah*.¹¹

Penelitian ini memiliki kontribusi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya pengembangan ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), khususnya penerapan *fiqh siyasah* dalam analisis implementasi kebijakan publik di bidang penyelenggaraan infrastruktur. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, dan instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan melalui penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan

¹⁰ Dani Amran Hakim and Hevina Nopriza, 'PERAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA', *Jurnal Hukum Positum*, 7.2 (2022), pp. 205–27.

¹¹ Ulliynta Mona Hutasuht and others, 'Problematisasi Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), pp. 135–52.

terhadap regulasi, serta optimalisasi koordinasi dalam pengelolaan ruang milik jalan.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung dalam perspektif *fiqh siyasah*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemanfaatan ruang milik jalan yang efektif, akuntabel, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung dalam perspektif *fiqh siyasah*.¹³ Penelitian dilaksanakan di BPJN Lampung sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan staf BPJN Lampung, serta masyarakat yang terdampak atau berada di sekitar lokasi pemanfaatan ruang milik jalan, sedangkan data sekunder diperoleh dari Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, dokumen resmi BPJN Lampung, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan.¹⁴

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif *fiqh siyasah*,¹⁵ khususnya konsep *siyasah tanfidziyyah*, untuk menilai implementasi kebijakan berdasarkan prinsip *keadilan (al-'adl)*, *amanah (al-amanah)*, *kemaslahatan (al-maslahah)*, serta tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.¹⁶ Keabsahan data diuji melalui *triangulasi sumber* dan

¹² Gusti Rahman, Nurnazli Nurnazli, and Eko Hidayat, 'Islamic Legal Perspective on the Enforcement of Public Order in Bandar Lampung Regional Regulation on Urban Conduct', *Rule of Law Studies Journal*, 1.2 (2025), pp. 114–26.

¹³ Yoki Yusanto, 'Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif', 1.1 (2019), pp. 1–13.

¹⁴ Tedi Priatna and others, 'DATA COLLECTION TECHNIQUES IN QUALITATIVE RESEARCH: A CONCEPTUAL AND LITERATURE-BASED STUDY TEKNIK PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF: KAJIAN KONSEPTUAL DAN BERBASIS LITERATUR', 2.4 (2025), pp. 465–70.

¹⁵ Qalam Lil Mubtadin and others, 'PENDEKATAN STRATEGIS DALAM PENGUMPULAN DATA', 2025.

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 47–56; Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 186–192.

triangulasi teknik guna memperoleh hasil penelitian yang kredibel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan pada BPJN Lampung

Implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dalam Penggalian dan Penataan Infrastruktur Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan penggalian dan penataan infrastruktur utilitas di ruang milik jalan. Peraturan tersebut mengatur tata cara pengajuan permohonan, persyaratan administratif dan teknis, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, serta kewajiban pemulihan kondisi jalan setelah pekerjaan selesai. Kehadiran regulasi ini bertujuan mewujudkan kepastian hukum, menjaga fungsi ruang milik jalan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta memastikan setiap kegiatan pemanfaatan ruang milik jalan dilakukan secara tertib, terkoordinasi, dan bertanggung jawab oleh seluruh penyelenggara infrastruktur publik.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan di BPJN Lampung telah berjalan, ditunjukkan dengan adanya mekanisme perizinan, pemeriksaan dokumen administrasi, penilaian teknis terhadap rencana pekerjaan, pengawasan selama pelaksanaan penggalian, hingga evaluasi terhadap pemulihan kondisi jalan setelah pekerjaan selesai. Setiap pemanfaatan ruang milik jalan pada prinsipnya wajib memperoleh rekomendasi teknis sebelum pekerjaan dilaksanakan agar kegiatan tersebut tidak mengganggu fungsi jalan, keselamatan pengguna jalan, maupun keberadaan utilitas lainnya.¹⁸

Dalam pelaksanaannya, BPJN Lampung juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi penyelenggara utilitas, kontraktor pelaksana, serta pihak terkait lainnya guna memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keterpaduan pembangunan infrastruktur karena ruang milik jalan merupakan kawasan yang dimanfaatkan oleh berbagai jaringan utilitas, seperti jaringan listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, dan jaringan lainnya.¹⁹

¹⁷ Dewi Ria Asih Aryani; Suprayitno, Hitapriya; Budianto, Herry, 'Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional, Studi Kasus Di Ruas Jalan MERR Surabaya'.

¹⁸ Arlan Marzan and others, 'Social Dynamics in the Implementation of Road Part Utilization Licensing: An Exploratory Study of the Impact on the Quality of Provincial Roads in Banten'.

¹⁹ Aldi Dwi Mawardi and Indah Marlina Ardianti, 'Infrastructure Development Priority Analysis of Road Networks Using the AHP Method (Study Case: Inter-District Capital Connector in Mesuji Regency, Lampung)', *Journal of Engineering Innovation and Management Science*, 1.1 (2025), pp. 25–40.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut terlihat dari masih ditemukannya beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya berjalan secara efektif sehingga pada beberapa kegiatan masih ditemukan perbedaan waktu pelaksanaan pekerjaan maupun keterlambatan penyampaian informasi antarpengelola.
2. pemulihan kondisi jalan pascapenggalan pada beberapa lokasi belum dilaksanakan secara tepat waktu sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
3. kepatuhan pelaksana pekerjaan terhadap ketentuan teknis masih belum seragam, terutama berkaitan dengan standar pelaksanaan pekerjaan, pemasangan rambu pengaman, serta kewajiban mengembalikan kondisi jalan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Selain kendala tersebut, masyarakat yang berada di sekitar lokasi pekerjaan juga masih merasakan dampak pelaksanaan penggalan berupa terganggunya mobilitas, meningkatnya kemacetan pada waktu tertentu, debu, serta penurunan kenyamanan selama pekerjaan berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan, meskipun secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas.²⁰

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam melakukan koordinasi, pengawasan, serta pengendalian terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pemanfaatan ruang milik jalan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi peraturan, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaannya di lapangan.²¹

Temuan tersebut sejalan dengan konsep implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan keputusan pemerintah melalui tindakan nyata untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi tidak berhenti pada pembentukan regulasi, melainkan menuntut adanya koordinasi antarorganisasi, kepatuhan pelaksana, pengawasan,

²⁰ Kecamatan Enok and Kabupaten Indragiri, 'Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir', 2024, pp. 390–99.

²¹ Astrid Itsnawati and others, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANJAB DAN ABK OLEH BIRO ORTALA DALAM MENDORONG EFEKTIVITAS PENATAAN', 12 (2025), pp. 4–12.

serta evaluasi secara berkelanjutan agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara efektif. Dalam konteks pemanfaatan ruang milik jalan, implementasi kebijakan bertujuan menjaga fungsi jalan sebagai prasarana transportasi sekaligus mendukung pembangunan utilitas publik tanpa mengurangi aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.²²

Apabila dianalisis menggunakan konsep implementasi kebijakan publik, kondisi di BPJN Lampung menunjukkan bahwa kebijakan telah memasuki tahap pelaksanaan, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama koordinasi antarinstansi, kepatuhan penyelenggara utilitas terhadap ketentuan teknis, serta konsistensi pengawasan oleh instansi yang berwenang. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan dalam aspek koordinasi, pengendalian, dan evaluasi agar tujuan kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2023 dapat tercapai secara optimal.²³

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan pada BPJN Lampung telah terlaksana, namun belum optimal dalam mencapai tujuan penyelenggaraan infrastruktur publik. Optimalisasi implementasi memerlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kepatuhan penyelenggara utilitas terhadap ketentuan teknis, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan pemanfaatan ruang milik jalan yang lebih tertib, efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

B. Hambatan Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan pada BPJN Lampung

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2023. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan yang menyebabkan implementasi belum berjalan secara

²² Yunanda Raharjanto, Bram Hertasing, and Febrianto Fatah Yogatama, 'Implementasi Kebijakan Hukum Untuk Meningkatkan Pengaturan Dan Penertiban Pada Jalan Nasional: Studi Kasus Pada Ketertiban Lalu Lintas Dan Mobilitas Masyarakat', *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 25.2 (2024), pp. 142–48.

²³ Yoyok Cahyono, 'Koordinasi Antar Lembaga Dalam Implementasi Kebijakan Publik : Studi Kualitatif Tata Kelola Kolaboratif', 1.1 (2026), pp. 14–19.

optimal. Hambatan tersebut meliputi aspek koordinasi antarinstansi, pemulihan kondisi jalan setelah pekerjaan utilitas, kepatuhan penyelenggara utilitas terhadap ketentuan teknis, serta dampak pelaksanaan pekerjaan terhadap masyarakat.²⁴

1. Koordinasi antarinstansi belum optimal

Koordinasi merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan karena pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan melibatkan berbagai instansi, seperti BPJN Lampung, pemerintah daerah, penyelenggara utilitas, kontraktor pelaksana, dan instansi teknis lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi telah dilaksanakan melalui proses perizinan, pemberian rekomendasi teknis, dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan keterlambatan penyampaian informasi, perbedaan jadwal pelaksanaan pekerjaan, serta belum sinkronnya perencanaan antarinstansi. Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan utilitas belum sepenuhnya terintegrasi sehingga pengawasan menjadi kurang efektif. Ketidaksinkronan komunikasi juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih pekerjaan pada lokasi yang sama dan menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur melalui penyusunan jadwal pelaksanaan secara terpadu, peningkatan komunikasi lintas instansi, serta sistem pertukaran informasi yang lebih efektif agar seluruh tahapan pekerjaan dapat berjalan secara selaras.²⁵

2. Pemulihan kondisi jalan pascapenggalian belum optimal

Hasil observasi menunjukkan bahwa pada beberapa lokasi pekerjaan utilitas masih ditemukan kondisi jalan yang belum segera dipulihkan setelah proses penggalian selesai. Pemulihan kondisi jalan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan sehingga mengurangi kualitas infrastruktur jalan dan kenyamanan pengguna jalan. Keterlambatan pemulihan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban penyelenggara utilitas belum berjalan secara maksimal. Apabila kondisi jalan tidak segera dipulihkan, maka risiko kecelakaan lalu lintas dapat meningkat, umur pelayanan jalan menjadi lebih pendek, serta biaya pemeliharaan jalan berpotensi bertambah. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan yang lebih intensif terhadap

²⁴ Beni Febriansyah and others, 'Implementasi Kebijakan Tentang Tata Ruang Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin', 5.September (2022).

²⁵ Muhamad Imam, Alfie Syarien, and Ghina Samarah, 'Interagency Coordination Drivers , Instruments , and Success Factors : A Systematic Literature Review', 19.148 (2023), pp. 301–18, doi:10.24258/jba.v19i3.1296.

pelaksanaan pemulihan jalan disertai evaluasi berkala agar setiap penyelenggara utilitas memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁶

3. Kepatuhan penyelenggara utilitas terhadap ketentuan teknis belum seragam

Penelitian juga menemukan bahwa tingkat kepatuhan penyelenggara utilitas terhadap ketentuan teknis masih belum seragam. Beberapa pelaksana pekerjaan belum sepenuhnya memenuhi standar teknis, terutama dalam pemasangan rambu pengaman, pengaturan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung, dan pemulihan kondisi jalan sesuai spesifikasi teknis. Belum optimalnya kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi kendala pada tahap pelaksanaan di lapangan. Padahal, kepatuhan terhadap standar teknis merupakan unsur penting untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, menjaga kualitas infrastruktur, serta memastikan bahwa setiap pekerjaan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan perlu didukung melalui pengawasan lapangan yang lebih efektif, evaluasi secara berkala, dan penerapan sanksi administratif secara konsisten terhadap setiap pelanggaran.²⁷

Selain hambatan yang bersifat kelembagaan dan teknis, penelitian ini juga menemukan adanya dampak yang dirasakan masyarakat selama pelaksanaan pekerjaan utilitas. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat mengeluhkan terganggunya mobilitas akibat kemacetan lalu lintas, meningkatnya debu selama proses penggalian, serta menurunnya kenyamanan ketika pekerjaan berlangsung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan. Meskipun pembangunan utilitas bertujuan meningkatkan pelayanan publik, proses pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan pekerjaan yang lebih baik melalui penyediaan rambu pengaman, pengaturan lalu lintas yang memadai, serta pengawasan terhadap dampak pekerjaan agar gangguan terhadap masyarakat dapat diminimalkan.²⁸

²⁶ Pavement Condition Index, 'PENURUNAN PELAYANAN JALAN AKIBAT DISINTEGRATION, UTILITY CUT DEPRESSION, BLEEDING, DAN POLISHED AGGREGATE PADA PERKERASAN LENTUR', 1.1 (2011), pp. 38–48.

²⁷ Pada Ruas and others, 'Uji Laik Fungsi Jalan Secara Teknis', 22.88 (2024).

²⁸ Dewa Ketut Sudarsana and Achmad Wicaksono, 'ROAD RECONSTRUCTION WORK ZONE MANAGEMENT', 1.1 (2015), pp. 9–16.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan pada BPJN Lampung dipengaruhi oleh aspek koordinasi antarinstansi, pelaksanaan teknis pekerjaan, kepatuhan penyelenggara utilitas, dan dampak terhadap masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan, namun efektivitasnya masih memerlukan peningkatan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pengawasan, peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan teknis, serta evaluasi pelaksanaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan kebijakan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang milik jalan yang tertib, aman, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal.

C. Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

Implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam mengatur penggunaan ruang milik jalan agar tetap berfungsi sebagai prasarana transportasi sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur utilitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pelaksanaan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur mekanisme perizinan, persyaratan administratif dan teknis, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, serta kewajiban pemulihan kondisi jalan setelah pekerjaan utilitas selesai.²⁹

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kewenangan tersebut termasuk ke dalam *siyasah tanfidziyyah*, yaitu kewenangan pemerintah dalam melaksanakan dan menegakkan kebijakan sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari terlaksananya prosedur administratif, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan secara adil, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisā' [4]: 58:

²⁹ Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Dalam Penggalan Dan Penataan Infrastruktur Publik

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisā' [4]: 58).

Ayat tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah dan keadilan. Dalam konteks implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan, BPJN Lampung memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses perizinan, pelaksanaan pekerjaan utilitas, pengawasan, hingga pemulihan kondisi jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Amanah tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas sesuai kewenangan, tetapi juga melalui komitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan. Sementara itu, prinsip keadilan menghendaki agar seluruh penyelenggara utilitas memperoleh perlakuan yang sama dalam proses perizinan dan pengawasan, serta bertanggung jawab atas setiap dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pekerjaannya.³⁰

Pelaksanaan implementasi kebijakan di BPJN Lampung menunjukkan bahwa mekanisme perizinan dan pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2023. Setiap penyelenggara utilitas diwajibkan memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebelum memperoleh izin pemanfaatan ruang milik jalan, serta berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai rekomendasi teknis yang diberikan oleh BPJN Lampung. Selain itu, BPJN Lampung juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan bahwa kegiatan utilitas tidak mengganggu fungsi jalan nasional dan tetap memperhatikan aspek keselamatan pengguna jalan. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi *siyasah tanfidziyyah* sebagai

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisā' [4]: 58.

pelaksana kebijakan publik dalam rangka mengatur pemanfaatan ruang milik jalan.³¹

Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Koordinasi antarinstansi yang belum efektif masih menyebabkan keterlambatan penyampaian informasi dan belum sinkronnya jadwal pelaksanaan pekerjaan utilitas. Di samping itu, masih ditemukan keterlambatan pemulihan kondisi jalan setelah pekerjaan penggalian selesai serta belum seragamnya kepatuhan penyelenggara utilitas terhadap ketentuan teknis, khususnya terkait pemasangan rambu pengaman, pengaturan lalu lintas, dan pemulihan kondisi jalan sesuai spesifikasi teknis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, karena tanggung jawab dalam menjaga fungsi jalan sebagai fasilitas publik belum dilaksanakan secara maksimal oleh seluruh pihak yang terlibat.³²

Dari sisi keadilan (*al-'adl*), implementasi kebijakan juga belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat sebagai pengguna jalan. Pekerjaan utilitas yang masih menimbulkan kemacetan, debu, gangguan mobilitas, serta penurunan kenyamanan menunjukkan bahwa manfaat pembangunan utilitas belum sepenuhnya diimbangi dengan upaya meminimalkan dampak negatif yang dirasakan masyarakat. Padahal, dalam *fiqh siyasah* keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan perlakuan dalam penerapan aturan, tetapi juga sebagai upaya menjaga hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan publik yang aman, nyaman, dan tidak menimbulkan kerugian. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan tidak hanya dituntut memenuhi aspek legalitas administratif, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan.³³

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan adalah mewujudkan kemaslahatan (*al-maslahah*). Pemanfaatan ruang milik jalan pada dasarnya memberikan manfaat yang besar dalam mendukung pembangunan jaringan listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, dan berbagai utilitas lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Namun demikian, manfaat tersebut harus diimbangi dengan pelaksanaan

³¹ Prayoga Dimas, 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN PEMUKIMAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2026).

³² Firdiansyah Eka Rachmawan and others, 'Evaluasi Hasil Audit Pada Proyek Preservasi Jalan Dan Jembatan Dalam Kepatuhan Terhadap Spesifikasi Umum Bina Marga (Studi Kasus : Ruas Nongsa – Batu Ampar – Tembesi – Galang)', 2.September (2024), pp. 23–29.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 45–49.

pekerjaan yang memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan efektivitas pengawasan, kepatuhan penyelenggara utilitas terhadap ketentuan teknis, serta percepatan pemulihan kondisi jalan menjadi langkah yang diperlukan agar implementasi kebijakan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, yaitu amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan pada BPJN Lampung dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara menyeluruh.³⁴

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2023 telah dilaksanakan melalui mekanisme perizinan, pemeriksaan persyaratan administratif dan teknis, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, serta evaluasi pemulihan kondisi jalan. Namun, implementasi tersebut belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi kendala berupa koordinasi antarinstansi yang belum efektif, keterlambatan pemulihan kondisi jalan pascapenggalan, serta belum seragamnya kepatuhan penyelenggara utilitas terhadap ketentuan teknis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas koordinasi, pengawasan, dan kepatuhan para pelaksana.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, implementasi kebijakan pemanfaatan ruang milik jalan merupakan bentuk pelaksanaan *siyasah tanfidziyyah* yang menuntut pemerintah menjalankan amanah berdasarkan prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-amanah* (amanah), dan *al-maslahah* (kemaslahatan). Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas instansi, peningkatan efektivitas pengawasan, serta penegakan kepatuhan terhadap ketentuan teknis perlu dilakukan agar implementasi kebijakan mampu mewujudkan tata kelola pemanfaatan ruang milik jalan yang efektif, akuntabel, berkeadilan, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

³⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 45–52.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Yoyok, 'Koordinasi Antar Lembaga Dalam Implementasi Kebijakan Publik : Studi Kualitatif Tata Kelola Kolaboratif', 1.1 (2026), pp. 14–19
- Dewi Ria Asih Aryani; Suprayitno, Hitapriya; Budianto, Herry, Dyah Kusuma; Soemitro, 'Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional, Studi Kasus Di Ruas Jalan MERR Surabaya', *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, Vol 4, No 3 (2020): Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas, 2020
<<https://iptek.its.ac.id/index.php/jmaif/article/view/7103/4788>>
- Dimas, Prayoga, 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN PEMUKIMAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2026)
- Enok, Kecamatan, and Kabupaten Indragiri, 'Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir', 2024, pp. 390–99
- Febriansyah, Beni, Feri Irawan, Kholil Albab, and Frans Gustian, 'Implementasi Kebijakan Tentang Tata Ruang Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin', 5.September (2022)
- Hakim, Dani Amran, and Hevina Nopriza, 'PERAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA', *Jurnal Hukum Positum*, 7.2 (2022), pp. 205–27
- Heru Sugiyono, Dwi Aryanti Ramadhani, 'UTILIZATION OF TOLL ROAD SECTIONS AS STATE PROPERTY FOR MAXIMIZING PUBLIC WELFARE', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 25, N (2023), pp. 300-315.
- Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, and Triono Triono, 'Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), pp. 135–52
- Imam, Muhamad, Alfie Syarien, and Ghina Samarah, 'Interagency Coordination Drivers , Instruments , and Success Factors : A Systematic Literature Review', 19.148 (2023), pp. 301–18, doi:10.24258/jba.v19i3.1296

- Index, Pavement Condition, 'PENURUNAN PELAYANAN JALAN AKIBAT DISINTEGRATION , UTILITY CUT DEPRESSION , BLEEDING , DAN POLISHED AGGREGATE PADA PERKERASAN LENTUR', 1.1 (2011), pp. 38–48
- Itsnowati, Astrid, Abdul Rahman, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, and Jakarta Pusat, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANJAB DAN ABK OLEH BIRO ORTALA DALAM MENDORONG EFEKTIVITAS PENATAAN', 12 (2025), pp. 4–12
- Marzan, Arlan, Elisa Susanti, Herijanto Beki, and Ramadhan Pancasilawan, 'Social Dynamics in the Implementation of Road Part Utilization Licensing: An Exploratory Study of the Impact on the Quality of Provincial Roads in Banten'
- Mawardi, Aldi Dwi, and Indah Marlina Ardianti, 'Infrastructure Development Priority Analysis of Road Networks Using the AHP Method (Study Case: Inter-District Capital Connector in Mesuji Regency, Lampung)', *Journal of Engineering Innovation and Management Science*, 1.1 (2025), pp. 25–40
- Mikro, Oleh Usaha, and Kecil D A N Menengah, 'Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol Oleh Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah', 27 (2022), pp. 61–71
- Mubtadin, Qalam Lil, Kualitatif Studi, Teknik Wawancara, and D A N Dokumentasi Dalam, 'PENDEKATAN STRATEGIS DALAM PENGUMPULAN DATA', 2025
- Priatna, Tedi, Bayu Bambang, Nur Fauzi, Dewi Nuraeni, Eli Setia, Mukti Sari, and others, 'DATA COLLECTION TECHNIQUES IN QUALITATIVE RESEARCH: A CONCEPTUAL AND LITERATURE-BASED STUDY TEKNIK PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF: KAJIAN KONSEPTUAL DAN BERBASIS LITERATUR', 2.4 (2025), pp. 465–70
- Rachmawan, Firdiansyah Eka, Surya Hermawan, Program Profesi Insinyur, and Universitas Kristen Petra, 'Evaluasi Hasil Audit Pada Proyek Preservasi Jalan Dan Jembatan Dalam Kepatuhan Terhadap Spesifikasi Umum Bina Marga (Studi Kasus : Ruas Nongsa – Batu Ampar – Tembesi – Galang)', 2.September (2024), pp. 23–29
- Raharjanto, Yunanda, Bram Hertasning, and Febrianto Fatah Yogatama, 'Implementasi Kebijakan Hukum Untuk Meningkatkan Pengaturan Dan Penertiban Pada Jalan Nasional: Studi Kasus Pada Ketertiban Lalu Lintas Dan Mobilitas Masyarakat', *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 25.2 (2024), pp. 142–48
- Rahman, Gusti, Nurnazli Nurnazli, and Eko Hidayat, 'Islamic Legal Perspective on the

- Enforcement of Public Order in Bandar Lampung Regional Regulation on Urban Conduct', *Rule of Law Studies Journal*, 1.2 (2025), pp. 114–26
- Ruas, Pada, Jalan Sam, Ratulangi Manado, Dengan Nomor, Christine A Darmawan, Theo K Sendow, and others, 'Uji Laik Fungsi Jalan Secara Teknis', 22.88 (2024)
- Sawitri, Dhian, 'The Contribution of Road Construction on Regional Economic Development in Indonesia', VII.3 (2023), pp. 313–33
- Sudarsana, Dewa Ketut, and Achmad Wicaksono, 'ROAD RECONSTRUCTION WORK ZONE MANAGEMENT', 1.1 (2015), pp. 9–16
- Yusanto, Yoki, 'Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif', 1.1 (2019), pp. 1–13